

Faktor Penyebab Terhentinya Program Urban Farming Akuaponik di Kota Bandung

Alpiani Herawan*, Aan Julia

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*alpianiherawan@gmail.com, aan.unisba@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study was to determine the factors that caused the cessation of the Aquaponics urban farming program in Bandung City by the Bandung City National and Political Unity Agency. The problems behind this program are the phenomenon of poverty in urban areas, agricultural land in urban areas that is increasingly disappearing, the lack of available green open spaces, food dependence on other areas, and soaring food prices at one time that occurred in the city of Bandung. The method used in this study is a qualitative method using a theoretical model of policy implementation. Data was collected by observation, interviews, and documentation. Informants in the study were determined through Non-Random Sampling with the Purposive method. Data analysis was carried out through the process of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the cessation of the Aquaponics urban farming program was caused by four factors, namely policy objectives and standards, resources, characteristics of implementing agencies, and the quality of interorganizational relationships. The causal factor is influenced by six indicators that influence it, namely, procedures, human resources, financial resources, facility resources, implementing control, coordination, and consistency.*

Keywords: *Urban Farming, Aquaponics, Food Security, Program Discontinuity.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terhentinya program urban farming Akuaponik di Kota Bandung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung. Permasalahan yang meletarbelakangi program ini merupakan fenomena kemiskinan di daerah kota, lahan pertanian di perkotaan yang semakin hilang, kurangnya Ruang Terbuka Hijau yang tersedia, ketergantungan pangan terhadap daerah lain, dan melonjaknya harga pangan dalam suatu waktu yang terjadi di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan model teoritis implementasi kebijakan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ditentukan melalui Non-Random Sampling dengan metode Purposive. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhentinya program urban farming Akuaponik disebabkan oleh empat faktor yaitu tujuan dan standar kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, dan kualitas hubungan interorganisasional. Faktor penyebab tersebut dipengaruhi oleh enam indikator yang mempengaruhinya yaitu, prosedur, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya fasilitas, kontrol pelaksana, koordinasi, dan konsistensi.

Kata Kunci: Urban Farming, Akuaponik, Ketahanan Pangan, Diskontinuitas Program.

A. Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk dari desa ke Kota semakin pesat⁽¹⁾. Banyaknya jumlah migrasi yang masuk akan menimbulkan masalah kepadatan penduduk⁽²⁾. Akibatnya, banyak lahan yang dikonversi menjadi pemukiman sebagai konsekuensi dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk⁽³⁾.

Tingginya presentase wilayah terbangun dan belum dikembangkannya sistem penanganan lingkungan secara komprehensif serta berkesinambungan, menyebabkan kritisnya kondisi ekologi dan morfologi perkotaan yang ditunjukkan oleh semakin langkanya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau⁽⁴⁾. Bertambahnya jumlah penduduk berdampak pada produktivitas lahan yang beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi non pertanian⁽⁵⁾.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, Penyusutan luas lahan di Kota Bandung terjadi begitu signifikan, dan pada tahun 2003-2018 terjadi pengurangan lahan sebesar 1.379 hektare atau 98,5 hektare setiap tahunnya. Konversi lahan menjadi konsekuensi dari peningkatan aktivitas dan proses pembangunan lainnya yang dapat berimbas pada lahan yang masih produktif, serta menyebabkan semakin sempitnya lahan di perkotaan karena alih fungsi akan mempengaruhi sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat tersebut⁽⁶⁾.

Berdasarkan Survei Indeks Kota Layak Huni Kota Bandung, hanya terdapat empat kecamatan yang memiliki kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dengan kategori sangat layak, dua kecamatan dengan kategori layak, sedangkan 22 kecamatan yang lainnya termasuk dalam kategori kurang dan sangat kurang. Permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandung yang dihadapi begitu kompleks, pembangunan pemukiman baru, perkantoran, pasar, ataupun lainnya yang semakin meningkat terus mengurangi luas lahan sawah dan Ruang Terbuka Hijau, peningkatan suhu udara dan turunnya kualitas udara, sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas, dan kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau⁽⁷⁾.

Pentingnya ruang terbuka hijau memberikan banyak manfaat terutama bagi aspek ekonomi bagi masyarakat perkotaan, yaitu dapat memberi peluang pengembangan sumber produk yang bisa di jual maupun di konsumsi sendiri, misalnya bahan makanan seperti buah-buahan, sayuran hijau, bahan rempah, bahkan umbi-umbian atau akarnya. Selain itu, dapat juga meningkatkan stabilitas kegiatan ekonomi dengan cara menarik minat wisatawan dan peluang-peluang bisnis lainnya, orang-orang akan menikmati jalur hijau, kantor-kantor dan apartemen di area yang berpohon⁽⁸⁾.

Di Kota Bandung, adanya kesadaran masyarakat terhadap kurangnya ruang terbuka hijau dan banyaknya ruang atau lahan yang tidak dimanfaatkan, memunculkan gerakan *urban farming* (Belinda & Rahmawati, 2017). Gerakan *Urban Farming* dipelopori oleh Ridwan Kamil (Walikota Bandung 2013-2018) pada tahun 2011 sebagai respon permasalahan yang ada diperkotaan. Program ini memanfaatkan lahan atau ruang terbuka dan tidak membutuhkan lahan yang luas⁽⁹⁾. Adanya *Urban farming* ditujukan agar dapat membantu masyarakat memenuhi konsumsi sebagai penunjang dalam skala rumah tangga, memproduktifkan masyarakat agar lebih mandiri baik secara sosial maupun ekonomi, membantu memecahkan masalah ekologis, meningkatkan estetika lahan kosong, dan meningkatkan nilai ekonomis bagi masyarakat⁽¹⁰⁾. Salah satu kegiatan *urban farming* yang dilakukan dengan metode Akuaponik yang produksinya melalui budidaya hewan air.

Berdasarkan wawancara dengan Dedy Djunaedi selaku penanggung jawab program *urban farming* akuaponik di Kota Bandung pada bulan januari tahun 2022, beliau menyebutkan bahwa metode akuaponik merupakan metode yang mudah digunakan. Menurutnya, awal kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2018 dan dilakukan di 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dinamakan kelompok tani. Namun, selama masa program ini dijalankan hanya beberapa kelompok yang memiliki hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Beliau juga mengatakan, banyaknya kendala pada kegiatan yang dijalankan membuat program akhirnya dihentikan dan tidak berlanjut, padahal program tersebut menggunakan sistem yang mudah dan fasilitas yang tersedia. Melihat dari hasil evaluasi program termasuk partisipasi masyarakat dan hasil produksi, program ini diputuskan untuk terhenti pada tahun 2022.

Permasalahan program pemerintah tidak hanya terjadi di Kota Bandung, tetapi sebelumnya juga terjadi di beberapa Kota bahkan di berbagai wilayah yang menerapkan urban farming saat ini terancam pada fenomena diskontinuitas (ketidakberlanjutan) karena biayanya lebih mahal atau tidak efisien, sehingga penerima manfaat tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perencanaan praktik baru⁽¹⁾. Di Kota Malang, diskontinu program terjadi akibat tidak ada ukuran kebijakan program, masyarakat kurang paham dalam pelaksanaannya karena masih terlalu tidak acuh terhadap lingkungan, kurangnya pengawasan dan evaluasi, sehingga kemauan masyarakat dalam partisipasi tidak berjalan efektif bahkan sampai terhenti ditengah jalan (Setyaningrum & Ati, 2021 Di Kota Surabaya, permasalahan urban farming mengakibatkan kegagalan panen karena kesalahpahaman penerima dana tentang fungsi dana, penerima dana menggunakan dana untuk kebutuhan pribadi, UMKM, tidak bisa mengelola dana dengan baik, juga tidak adanya tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut⁽²⁾. Di Kabupaten Gresik, program urban farming tidak berjalan efektif disebabkan oleh struktur birokrasi tanggung jawab pelaksana terhadap pembuat kebijakan program yang masih kurang baik⁽³⁾. Di Kota Sidoarjo, pelaksanaan urban farming terhambat karena kurangnya keaktifan masyarakat dalam memberi *feedback*, kurangnya pendampingan dan pengawasan, juga keterbatasan dalam mensosialisasikan karena adanya regulasi PPKM darurat⁽⁴⁾.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui faktor yang menyebabkan tidak berlanjutnya program kegiatan di Kota Bandung melalui penelitian yang berjudul “Faktor Penyebab Terhentinya Program Urban Farming Akuaponik di Kota Bandung”.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan sumber data primer. Lokasi penelitian ini yaitu Kota Bandung. Adapun penentuan informan yang dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu wawancara mendalam, observasi secara langsung, dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi dan membercheck.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara sehingga memiliki sifat langsung untuk memperoleh informasi guna menjelaskan suatu hal dan kondisi tertentu. Data penelitian dikumpulkan dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung antara peneliti dengan informan yaitu ketua pelaksana program, komunitas penggiat lingkungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung bagian ketahanan pangan, dan aparatatur daerah kecamatan di Kota Bandung. Perolehan data dilakukan sekitar 6 (Enam) minggu.

Faktor yang Mempengaruhi Diskontinuitas Program *Urban Farming* Akuaponik di Kota Bandung

Penelitian ini menggunakan dasar teori implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dengan cara melihat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi untuk mengetahui permasalahan apa saja yang mempengaruhi dan menjadi penyebab program urban farming akuaponik di Kota Bandung mengalami diskontinuitas Faktor tersebut yaitu, tujuan dan standar kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, kualitas hubungan interorganisasional, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial ekonomi dan politik. Faktor-faktor tersebut juga memuat indikator-indikator yang mempengaruhi di dalamnya. Faktor yang Mempengaruhi Diskontinuitas Program Urban Farming Akuaponik di Kota Bandung.

1. Tujuan dan Standar Kebijakan

Tujuan dari program kegiatan urban farming akuaponik di Kota Bandung yang telah dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga dengan mengatasi kerentanan pangan keluarga yang dilatarbelakangi permasalahan yang

timbul diperkotaan antara lain kemiskinan, lahan pertanian yang perlahan menghilang, kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, ketergantungan pangan terhadap daerah lain, dan kelonjakan harga pada waktu tertentu. Tujuan tersebut diketahui oleh seluruh pihak pelaksana yang terlibat dalam program sebagai dasar penyelenggaraan program kegiatan. Tujuan program yang dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sudah dipahami dengan baik dan disetujui oleh para pelaksana program di lapangan. Para pelaksana program menyadari bahwa pentingnya untuk meningkatkan pangan dalam skala mandiri di daerah perkotaan untuk mengatasi kerawanan pangan. Pada proses pelaksanaannya, dirumuskan tahapan pelaksanaan program oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagai pihak penyelenggara.

Tabel 1. Tahapan Pelaksanaan Program

<i>Tahapan</i>	<i>Uraian</i>
<i>Persiapan</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan survei mengenai kondisi di lapangan dan sasaran kegiatan. ○ Mengumpulkan informasi di masyarakat mengenai potensi sumber daya dan lingkungan. ○ Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, aparat daerah, dan penggiat lingkungan untuk menentukan kelompok sasaran dan lokasi kegiatan. ○ Pemilihan pendamping menurut kriteria yang telah ditentukan.
<i>Sosialisasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sosialisasi dilakukan pada SKPD Terkait, Kasi Ekbang Kecamatan, Kasi Ekbang Kelurahan, dan Masyarakat sasaran. ○ Sosialisasi untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan kepada para pelaksana program kegiatan.
<i>Perencanaan</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan rencana untuk pemanfaatan lahan yang tidak produktif, atau pekarangan rumah warga yang memungkinkan. ○ Mengaktifkan kembali alat bahan yang terbengkalai. ○ Membuat jadwal kegiatan program dengan pihak terkait termasuk monitoring, dan evaluasi.
<i>Pelaksanaan</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Membentuk kelompok masyarakat sasaran kegiatan. ○ Melakukan pelatihan dan pembinaan pada kelompok sasaran. ○ Pendampingan dan kunjungan pada kelompok sasaran. ○ Perhatikan teknis dan pemeliharaan selama proses kegiatan.

Tabel diatas menunjukkan bahwa, terdapat standar kebijakan untuk mengatur program kegiatan yang akan dilakukan oleh para pelaku. Sistem, prosedur, dan aturan tersebut diterapkan untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Namun, berdasarkan temuan di lapangan ada permasalahan yang timbul dalam mengimplementasikan prosedur pelaksanaan yang telah dirumuskan. Pada proses pelaksanaan terjadi hambatan dalam tahap pembinaan setelah sosialisasi, dimana terdapat daerah yang belum mendapatkan pembinaan untuk pelaksanaan program. selain itu, ada juga daerah yang belum menjalankan program kegiatan bahkan sampai saat ini. Berdasarkan observasi dan wawancara, terdapat hambatan pada prosedur atau tahapan yang dialami oleh beberapa daerah sehingga program kegiatan mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya bahkan ada yang belum berjalan sampai saat ini.

2. Sumber Daya

Faktor sumber daya sangat signifikan terhadap pelaksanaan suatu program. Sumber daya dalam mendukung keberlangsungan program dibagi menjadi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial, Sumber Daya Fasilitas, dan Sumber Daya Informasi. Faktor sumber daya memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam menjalankan sebuah program sangat perlu di perhatikan karena untuk mendukung jalannya implementasi Program.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, green education, aparat daerah, dan masyarakat kelompok

tani. Namun, saat ini semakin menurunnya jumlah SDM yang terlibat menyebabkan ketersediaan sumber daya manusia di lapangan menjadi kurang tercukupi. Hal tersebut terjadi pada mayoritas Kecamatan yang ikut dalam program karena pembinaan dan bimbingan mengenai program terhambat akibat terjadinya pandemi covid-19. Sehingga, masyarakat kehilangan minatnya dan tidak adanya lagi bantuan yang diberikan. Yang menjadi permasalahan adalah partisipasi masyarakat menurun akibat dari tidak adanya sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan. Oleh karena itu, sulit untuk menambah jumlah anggota yang terlibat dan alat yang berkurang karena rusak sehingga membuat semangat masyarakat hilang.

2. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial untuk operasional program berasal dari DPA (Dewan Pelaksanaan Anggaran) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung yang merupakan anggaran dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Karena terjadinya pandemi covid-19 yang melemahkan perekonomian, maka anggaran yang diberikan APBD untuk DPA pun menjadi terbatas. Hal tersebut berdampak pada jalannya program *urban farming* akuaponik yang mengalami keterbatasan biaya sehingga menimbulkan pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat terbatas. Karena adanya pemangkasan biaya akibat pandemi, anggaran yang diberikan oleh DPA pada setiap bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung menjadi sangat terbatas untuk keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang. Jika program dipaksa berjalan, anggaran yang ada tetap tidak akan mencukupi keberlangsungan program dan justru akan membuat kegiatan lainnya menjadi terhambat.

3. Sumber Daya Fasilitas

Sumber daya fasilitas berupa sarana yang digunakan untuk keberlangsungan pelaksanaan program dapat berupa tempat, barang, atau lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan program tersebut. Fasilitas dalam hal ini merupakan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program seperti, adanya lahan kosong, bantuan bibit tanaman, nutrisi dan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan urban farming. Menurut hasil observasi, tidak ada pemberian fasilitas lahan yang seharusnya menjadi komponen utama pelaksanaan kegiatan, maka lahan yang digunakan merupakan lahan kosong milik masyarakat yang tidak digunakan. Sehingga untuk beberapa wilayah yang tidak memiliki lahan kosong, program kegiatan menjadi tidak terlaksana. Tetapi, fasilitas dalam bentuk lain diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung di awal program berupa alat dan bahan akuaponik untuk pelaksanaan kegiatan. Alat dan bahan tersebut merupakan seperangkat alat akuaponik dan pakan ikan yang diberikan kepada para kelompok tani. Bahkan diantaranya masih banyak yang beroperasi. Namun, penelitian di lapangan memuat temuan bahwa tidak semua daerah merasakan hal yang sama. Di beberapa daerah bahkan tidak merasakan adanya fasilitas bantuan alat dan bahan yang diberikan kepada para kelompok tani. Sumber daya fasilitas atau bantuan yang diberikan belum maksimal dan merata dari segi pengadaan. Beberapa daerah menerima dan daerah lainnya tidak menerima sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan program.

4. Sumber Daya Informasi

Sumber daya informasi dimiliki oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Bandung sebagai pemilik informasi dan yang merumuskan program kegiatan ini. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pembuat kebijakan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan lahan kosong. Berdasarkan hasil observasi, informasi diturunkan kepada aparatur daerah yang berada di setiap Kecamatan di Kota Bandung agar program kegiatan dapat diimplementasikan. Informasi tersebut memuat maksud, tujuan, dan tahapan yang disampaikan kepada para masyarakat yang ada di setiap daerahnya. Sehingga informasi yang didapat melalui struktural yang jelas. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pihak penyelenggara dengan berkoordinasi bersama aparatur daerah

juga melakukan kunjungan dan pengawasan secara langsung kepada masyarakat sasaran.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana menunjukkan seberapa besar daya dukung struktur organisasi dan perkembangan yang terjadi di internal birokrasi.

1. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berdasarkan mekanisme sistem program, yang menjadi penanggung jawab program merupakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagai pusat sumber informasi dan mengkoordinir pelaksanaan program. Tim pelaksana program yang melakukan pendampingan kepada para kelompok sasaran di lapangan. Kontrol pada program dilihat dari wewenang yang dilaksanakan oleh para pelaksana, pengambilan keputusan dilakukan oleh satu pihak agar tidak terjadinya tumpang tindih antar pelaku. Koordinasi dilakukan melalui pertemuan para perwakilan dari seluruh pihak. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung melibatkan beberapa pihak yang saling berhubungan yaitu, green education, aparaturnya daerah, pihak kecamatan, dan masyarakat sasaran. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung dengan terjun langsung dan didampingi aparaturnya daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung melakukan koordinasi dengan aparaturnya daerah di setiap kecamatan terkait dengan pelaksanaan program di lapangan. Penyampaian kepada masyarakat dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui aparaturnya daerah yang juga melakukan pendampingan kepada masyarakat sasaran di lapangan ketika program dijalankan dengan secara berkala untuk memonitor perkembangan proses kegiatan. Struktur birokrasi dalam program ini sudah terintegrasi dengan jelas terkait tugas para pelaksana program dan setiap pihak pelaksana memahami tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

2. Tingkat Kontrol

Tingkat kontrol dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi yang mempengaruhi perkembangan program kegiatan. Pengawasan dan evaluasi dalam program ini dilakukan baik pada jadwal yang telah ditentukan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memfokuskan pada pelatihan, monitoring, dan pendampingan di lapangan. Disini, monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan program yang dilakukan dengan kunjungan langsung pada masyarakat sasaran. Namun berdasarkan hasil penelitian, karena adanya pandemi covid-19 mengakibatkan proses monitoring dan evaluasi menjadi terhambat, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak terlaksana secara menyeluruh pada kelompok tani yang ikut dalam program ini. Pengawasan yang dilakukan belum merata kepada setiap daerah, penyebabnya karena kegiatan terpotong oleh pandemi covid-19, kemudian jarak keterjangkauan antar wilayah sehingga sulit untuk melakukan secara intensif, dan potensi dari sumber daya wilayahnya juga belum mendukung secara maksimal. Dengan kondisi monitoring yang belum maksimal berakibat pada evaluasi bersama yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung menjadi sulit terlaksana. Karakteristik badan pelaksana yang mengatur pelaksanaan program sudah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Namun, upaya yang dilakukan menjadi kurang maksimal karena terkendala pandemi covid-19 dan tidak adanya tim penyuluh yang terorganisir sehingga monitoring menjadi kurang intensif.

4. Kualitas Hubungan Interorganisasional

Kualitas hubungan ditunjukkan oleh koordinasi, komunikasi dan konsistensi yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya program. Hal ini ditunjukkan dengan proses koordinasi dan komunikasi yang konsisten selama proses berjalannya kegiatan. Komunikasi dan koordinasi dilakukan dengan pemahaman informasi program oleh seluruh pihak yang terlibat. Para pelaksana program ini harus mengetahui perencanaan sistem yang dijalankan sampai pada

penerapan program di lapangan.

1. Komunikasi

Para aktor yang terlibat memiliki tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung membuka ruang komunikasi terbuka sehingga dapat memberikan respon mengenai kesulitan selama masa proses kegiatan. Selain itu, mempersilahkan untuk seluruh kelompok para aktor yang terlibat memiliki tugas dan perannya masing-masing sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung membuka ruang komunikasi terbuka sehingga dapat memberikan respon mengenai kesulitan selama masa proses kegiatan. Selain itu, mempersilahkan untuk seluruh kelompok. komunikasi yang dijalankan oleh para pihak pelaksana sesuai dengan yang telah direncanakan oleh pihak pembuat kebijakan. Para pelaksana program ini mengetahui perencanaan dan sistem yang dijalankan sampai pada penerapan program di lapangan. Program ini telah dijalankan selama tiga tahun, dan sampai saat ini maksud dan tujuan program yang ingin dicapai masih tetap sama seperti pada saat perumusan program, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan lahan kosong yang ada di perkotaan untuk membantu ketahanan pangan masyarakat Kota. Komunikasi yang terjadi sudah baik dan konsisten meskipun belum maksimal. Adapun beberapa hambatan dalam pelaksanaan yang terjadi dan membutuhkan komunikasi yang baik seperti pengawasan dan evaluasi program dimana kurangnya data hasil pelaksanaan yang dilaporkan oleh pihak pelaksana lapangan sehingga pengembangan program menjadi sulit terlaksana.

2. Koordinasi

Koordinasi dan program ini, para pelaksana menggabungkan persepsi mengenai maksud dan tujuan program agar dapat diterima oleh masyarakat. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan kepada kelompok sasaran juga menjadikan proses koordinasi dapat berjalan selama masa kegiatan berlangsung. Koordinasi yang dilakukan oleh para pihak pelaksana selama berjalannya program dilakukan secara struktural sesuai dengan perencanaan program. Berdasarkan hasil temuan, dalam pelaksanaannya timbul suatu masalah dimana proses koordinasi menjadi terhambat sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak merata. Keberlangsungan program kegiatan yang tidak berjalan secara intensif pada para kelompok tani yang berlokasi cukup jauh dengan pihak penyelenggara membuat proses koordinasi menjadi kurang sempurna. Kendala yang dirasakan oleh masyarakat terikat kejelasan pada kegiatan program menjadi simpang siur mengenai prosedur yang akan dijalankan oleh para kelompok tani. Masyarakat menjadi kebingungan karena proses alur yang kurang jelas. Sehingga, dapat diinterpretasikan bahwa, koordinasi dalam pelaksanaan program urban farming akuaponik ini berjalan dengan baik meskipun belum maksimal. Koordinasi yang dijalankan sudah terlaksana namun untuk beberapa daerah masih terkendala dan belum merata kepada seluruh pelaksana lapangan karena potensi yang dinilai dari feedback daerah tersebut juga masih dianggap kurang.

5. Disposisi Pelaksana

Disposisi sebagai bentuk kecenderungan pelaku program dalam kesungguhannya melaksanakan program untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Disposisi muncul ketika kegiatan yang dilakukan memberikan dampak yang menguntungkan bagi para pelaku yang menjalankannya. Keuntungan dalam hal ini ketika setiap pihak merasa cukup akan pengetahuan dan pemahaman, lalu melakukan pendalaman terhadap kegiatan tersebut.

1. Sikap Pelaksana

Implementasi dikatakan efektif ketika para pelaksana tidak hanya memiliki pemahaman dalam pelaksanaan program, tetapi juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakannya. Sikap para pelaksana mempengaruhi cara pandang dan bagaimana dampak suatu kebijakan program terhadap kepentingan perorangan ataupun kelompok. Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa sikap dari para pelaksana program *urban farming* akuaponik Kota Bandung dapat menerima apa yang diputuskan oleh pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung untuk pengadaan program ini. Mereka menilai bahwa program ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang terlibat, dan dapat mengatasi permasalahan ekonomi di masyarakat. Bahkan para pelaksana program tidak hanya sekedar menerima program saja, tetapi mereka sudah ikut berkontribusi dan menjadi pelaku utama dalam menjalankan program ini dengan keinginan dan komitmen yang tinggi. Pelaksana program sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Jadi dapat diinterpretasikan bahwa sikap pelaksana dalam implementasi program *urban farming* akuaponik ini sangat baik, hal tersebut terlihat dari bagaimana mereka menangani proses berjalannya program kegiatan dilapangan, dan sikap tanggung jawab yang diberikan kepada kelompok sasaran.

2. Kecenderungan Pelaksana

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung diterima dengan baik oleh seluruh pihak termasuk kelompok sasaran, bahkan pengetahuan tersebut terus diberdayakan selama masa implementasi program. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa pemahaman masyarakat tumbuh dari rasa keinginan dan ketertarikan pada kegiatan program. sehingga mereka mau belajar memperdalam untuk mengimplimentasikannya. pemahaman para pelaksana program urban farming akuaponik di Kota Bandung sudah baik, bahkan penyampaian yang diberikan kepada masyarakat juga berdampak terhadap respon para pelaksana di lapangan yang dapat menerima program tersebut. Hal itu terlihat dari ketersediaan dan kemampuan para pelaksana dalam melaksanakan program.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Kondisi ini berkaitan dengan kondisi lingkungan yang kondusif dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat selama proses implementasi kegiatan program. Sumber daya sosial ekonomi dan politik lingkungan dalam hal ini mencakup interaksi sosial, respon masyarakat, maupun hasil produksi yang dihasilkan.

1. Kondisi Sosial dan Politik

Diadakannya program kegiatan *urban farming* akuaponik ini memuat hasil temuan bahwa dengan adanya kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di masyarakat maka dapat menumbuhkan interaksi sosial warga sekitar menjadi lebih aktif dan membuat intensitas kebersamaan dalam masyarakat menjadi meningkat. Kebersamaan masyarakat dapat terbentuk dengan adanya kegiatan ini. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat ini selama proses pelaksanaannya juga memberikan banyak manfaat untuk para masyarakat luas bahkan dapat meningkatkan interaksi sosial antar wilayah. Respon masyarakat terhadap program ini dikatakan baik dan cukup positif. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya keikutsertaan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan ini. Menurut observasi, masyarakat sudah ada kesadaran dalam melakukan *urban farming* karena kegiatan tersebut memberikan manfaat yang berdampak bagi diri mereka sendiri maupun lingkungan dengan menambah nilai estetikanya, Jika kegiatan ini berhasil, maka dampaknya dapat menarik masyarakat lain yang awalnya acuh menjadi tertarik dengan kegiatan seperti ini. Masyarakat melaksanakan kegiatan karena memang program yang

dilakukan memberikan keuntungan bagi mereka maupun orang-orang disekitarnya. Maka dapat diinterpretasikan bahwa respon masyarakat memang sangat positif karena masyarakat ini sifatnya rasional, jika memang kegiatannya memberikan keuntungan maka mereka mau melaksanakannya. Bahkan diterima dengan baik sampai pada skala individu.

2. Kondisi Ekonomi

Suatu program akan berhasil jika dapat memberikan hasil dan manfaat bagi para pelakunya. Hasil produksi dari kegiatan ini juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Setidaknya mereka dapat mengatasi kekhawatiran pangan, membantu masyarakat lainnya, mengatasi stunting, gizi buruk, ataupun kekurangan gizi. Bahkan pada beberapa kelompok dapat memberikan nilai ekonomis bagi pelakunya. Hasil dari kegiatan ini juga dapat membantu masyarakat lain. Ketika panen, hasil produksi akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga membantu warga yang mengalami kekurangan gizi karena kualitas yang dihasilkan oleh metode ini lebih bagus dan dapat terjamin organik karena belum terkontaminasi dengan bahan kimia. Pada kegiatan ini, fokus utama tidak hanya Tetapi kembali pada tujuan program, untuk membantu pangan masyarakat agar setidaknya terpenuhi dalam skala mandiri. Namun, beberapa kelompok berhasil sampai pada nilai ekonomis dan menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk perawatan kembali ataupun pendapatan pribadi. Adapula yang mengolah hasil produksi menjadi jenis makanan lainnya lalu kemudian dipasarkan sehingga nilai ekonomisnya semakin tinggi. Mayoritas kelompok tani saat ini menggunakan hasil produksi sebagai konsumsi pribadi dan didistribusikan untuk membantu masyarakat lain. Hasil produksi difokuskan untuk membantu ketahanan pangan masyarakat dan membantu untuk mengatasi stunting, gizi buruk, dan ibu hamil yang kekurangan gizi. Adapun beberapa kelompok tani yang sudah memiliki nilai ekonomis, mereka melakukan menjual ke pasar, warga sekitar, atau di olah menjadi makanan lain seperti kue, jus, pendamping makanan lain yaitu burger, dan sebagainya sebelum diperjualbelikan.

D. Kesimpulan

Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat empat faktor dan enam indikator yang mempengaruhinya sebagai penyebab program Urban Farming Akuaponik di Kota Bandung mengalami diskontinuitas diantaranya:

1. Pada Tujuan dan Standar Kebijakan, tahapan dalam Prosedur belum terlaksana dengan maksimal, sehingga keberlangsungan program tidak merata pada setiap daerah.
2. Pada Sumber Daya, kuantitas ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berpartisipasi dalam program semakin berkurang. Sumber Daya Finansial untuk anggaran pengadaan program cukup tinggi. Sumber Daya Fasilitas, tidak disediakan lahan untuk pelaksanaan program dan bantuan alat bahan yang tidak merata.
3. Pada Karakteristik Badan Pelaksana, Kontrol Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi tidak berjalan maksimal, sehingga laporan perkembangan program menjadi kurang jelas. Hal ini disebabkan juga oleh adanya regulasi PPKM karena pandemi Covid-19.
4. Pada Kualitas Hubungan Interorganisasional, Koordinasi dan Komunikasi yang dilakukan belum merata kepada setiap wilayah sehingga terjadi perbedaan kualitas hubungan di beberapa daerah.

Acknowledge

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aan Julia., S.E., M.Si selaku pembimbing saya, yang telah meluangkan waktu dan tenaga serta pikirannya dalam memberikan saran dan motivasi kepada penulis. Juga untuk seluruh pihak yang turut memberikan bantuan, dorongan dan dukungan untuk penulis dalam mengumpulkan data dan mencari informasi sehingga dapat terlaksananya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Michael, P. Todaro, *Economics for a Developing World, An Introduction to Principles, Problems and Policies for Development* Longman, 1977, pp.444. *Int Econ.* 1978;1978(29).
- [2] Trendyari AAT, Yasa INM. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Masuk Ke Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekon Pembang Univ Udayana.* 2014;3(10).
- [3] Arsyad SER. *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan.* Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. 2008.
- [4] Kota PP. *Permasalahan Kota Indonesia.* 2020;
- [5] IRNA H. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian sleman. 2015;0–93. Available from: [http://repository.stpn.ac.id/1016/1/Irna Harniyati.pdf](http://repository.stpn.ac.id/1016/1/Irna%20Harniyati.pdf)
- [6] Prihatin RB. Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta). *J Aspir.* 2016;6(2):105–18.
- [7] Kurniawan R. Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Dalam Upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda No. 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Pasal 46 Huruf (A) Dan Huruf (B) Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah. Dr Diss UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2018;
- [8] Yusmawar. Manfaat Ruang Terbuka Hijau Bagi Masyarakat Perkotaan Ditinjau dari Aspek Sosial Ekonomi Kota Banda Aceh. *J Ilm Mhs Ekon Pembang Fak Ekon dan Bisnis Unsyiah* [Internet]. 2016;1(1):290–8. Available from: <http://jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/703>
- [9] Mulyani A, Kuncoro D, Nursyamsi D, Agus F. Analisis Konversi Lahan Sawah : Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan. *J Tanah dan Iklim.* 2016;40(2).
- [10] Rahmilah J. Implementasi Program Urban Farming Di Kota Bandung. [Http://RepositoryUpiEdu/](http://RepositoryUpiEdu/) [Internet]. 2016; Available from: <http://repository.upi.edu>
- [11] Margareth, Abdoellah OS, Cahyandito MF, Safitri KI. Membangun Sinergi antar Perguruan Tinggi dan Industri Pertanian dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka - Implementasi Urban Farming Berdasarkan Perspektif Political Ecology. In: *Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis ke-45 UNS Tahun 2021.* 2021.
- [12] Umi Atia Hanik. Pengelolaan Dana Bantuan Sosial UMKM Dan Urban Farming Pada Program Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga (GETAPAK) Muhammadiyah Surabaya (Studi Analisis Maqashid Ash-Shari'ah). *Skripsi-Universitas Negeri Islam Sunan Ampel.* 2020;91.
- [13] Shobry MN. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Program Urban Farming Di Kabupaten Gresik. *Skripsi.* 2017;5:1–52.
- [14] Baskoro AG, Putri VA, Putri HA. Sosialisasi Microgreen sebagai Pengenalan Bentuk Budidaya Sayuran Urban Farming di Desa Sariogo Sidoarjo. *J Apl Tek dan Pengabd Masy.* 2021;5(3):7–12.
- [15] Yanti, Ayu Julida, Sundaya, Yukha. (2021). *Permintaan Wisata Kelompok Pemuda ke Kota Bandung.* *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis,* 1(1), 15-23.